

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan esensi yang digunakan sebagai sarana demokrasi dalam membentuk sistem kekuasaan di suatu Negara. Demokrasi pada dasarnya lahir dari kehendak rakyat karena rakyat menginginkan kekuasaan Negara dihasilkan dari bawah yaitu oleh rakyat sesuai dengan sistem permusyawaratan dan perwakilan. Pada kenyataannya pemilihan umum merupakan bagian dari suatu perwujudan dan pengakuan atas hak politik yang dimiliki masyarakat serta pendelegasian akan hak tersebut yang dilakukan oleh rakyat kepada wakil rakyat dalam menjalankan pemerintahan.

Jika dilihat dari sudut pandang demokrasi, pemilihan umum memiliki tujuan yaitu kembali berpegang pada prinsip-prinsip kebijaksanaan yang sesuai dengan nilai demokratis berdasarkan kepentingan golongan masyarakat. Pemilihan umum merupakan salah satu realisasi dari sistem demokrasi, dengan kata lain demokrasi dapat dimaknai sebagai wujud dari pluralisme sosial, budaya dan politik yang terdapat dalam masyarakat (Maliki dalam Astanti, 2016).

Pemilu dianggap tepat untuk menampung aspirasi masyarakat yang pluralistik, khususnya dalam menentukan calon pemimpin rakyat. Sebagaimana maknanya demokrasi dilihat dari asal katanya bermakna rakyat “berkuasa” atau “*government or rule by the people*” (Budiarjo dalam Astanti,

2016). Menurut Morissan (2005), pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Pandangan *Centre for Electoral Reform* (Cetro), pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu tonggak demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik.

Pemilu mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung bersifat *absolute* apabila tidak dikontrol dan diperbaharui. Tanpa pemilu maka terbuka peluang terjadi diktum politik *power tends to corrupt and absolute power corrupts absolutely* (kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti akan korup). Menurut Dieter Nohlen (Lindawati, 2014), fungsi pemilihan umum antara lain:

- a. Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
- b. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
- c. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
- d. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik serta kepentingan partai politik peserta pemilu;
- e. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
- f. Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan;
- g. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen.

Pemilihan umum dilakukan untuk menentukan pejabat politik, dimana pejabat politik yang dimaksudkan ialah orang-orang yang diusung oleh partai politik untuk mengisi jabatan politik di lembaga negara, seperti lembaga perwakilan rakyat (DPR), Presiden, Gubernur, Bupati serta Walikota. Dalam tingkat daerah pemilu dilakukan untuk memilih kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan anggota DPRD (Pileg).

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang disiapkan pemerintah agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka di tingkat daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan umum di provinsi dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan istilah Pemilihan Gubernur (Pilgub). Menurut Muslim (Lindawati, 2014), Pilgub adalah suatu proses demokrasi dengan cara memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk satu Provinsi dengan sah dan sesuai Undang-Undang yang ada dan diikuti dengan seluruh masyarakatnya.

Hal tersebut diperkuat didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dimana pengertian Pemilukada adalah:

“Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dalam melaksanakan pemilu, partisipasi politik merupakan instrumen penting yang menjadi tolak ukur dalam keberhasilan sebuah pemilu dilaksanakan. Partisipasi politik akan memperlihatkan tingkat aktivitas politik masyarakat dalam menentukan pilihannya ketika pemilu. Miriam Budiardjo (Lasut, 2014) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung dan memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).

Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya. Dilihat dari bentuk dan tipe partisipasi politik terdapat pula sejumlah kegiatan politik yang sering dilakukan dan terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu mencari dukungan atau kampanye, *lobby* politik, mencari koneksi (*contacting poiltict*) bahkan tidak jarang terdapat tindakan kekerasan politik (*violence*).

Sitepu dan Herbert McKlosky (Budiardjo, 2008) memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum (*the term of political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)”.

Dalam melaksanakan partisipasi, pemilih sebagai pemilik suara sekaligus partisipan memiliki peran yang sangat penting dalam menyuarakan partisipasi politiknya. Surbakti (Azmi, 2014) mengatakan bahwa pemilih diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.

Menurut pasal 1 ayat (22) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian dalam pasal 19 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih pemula merupakan golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun, namun ada definisi yang lain yaitu pemilih pemula adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda atau pemilih pemula ini adalah mereka yang baru akan mempunyai pengalaman pertama kali di dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, (Rohmah dalam Astanti, 2016). Adapun syarat-syarat yang harus dimiliki untuk menjadikan seseorang dapat memilih menurut Pahmi, (2010) adalah:

- a. umur sudah 17 tahun;
- b. sudah/pernah kawin;
- c. purnawirawan/sudah tidak lagi menjadi anggota TNI / Kepolisian.

Partisipasi politik kaum muda atau pemilih pemula dapat diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan kaum muda sebagai individu atau kelompok dalam even/bidang politik. Menurut Huntington (Veplun, 2014), terdapat 2 bentuk partisipasi warga negara termasuk kaum pemula yang terdiri dari Partisipasi Konvensional antara lain pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk atau bergabung dengan kelompok atau partai politik tertentu, atau komunikasi dengan pejabat partai politik tertentu, kemudian yang kedua adalah Partisipasi Non-Konvensional antara lain dengan pengajuan petisi, berdemonstrasi/unjuk rasa, mogok, konfrontasi, tindakan kekerasan politik, terhadap harta benda, perusakan, pemboman, pembakaran, tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, bahkan perang dan revolusi.

Dilansir dari <http://kpu.co.id>, menyatakan bahwasanya pemilih pemula memiliki peran penting dikarenakan jumlahnya sebesar 20,8% dari keseluruhan jumlah pemilih nasional, oleh karena itu jumlah pemilih pemula dapat dikatakan cukup banyak pada tingkat nasional sehingga rakyat ketika memanfaatkan hak pilihnya tidak melakukan kesalahan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hasil pilkada serentak tahun 2017 dari KPU RI (<http://kpu.co.id>), bahwa jumlah pemilih pemula pada Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebanyak 28.328 orang dengan persentase sebesar 21,7 % atau satu perlima dari jumlah total pemilih. Dengan jumlah yang cukup besar maka diperlukan startegi pendekatan untuk dapat menjadikan pemilih pemula kedalam sumber suara yang potensial.

Tiga pendekatan teori yang seringkali digunakan oleh para sarjana untuk memahami perilaku pemilih yakni pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis dan pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*). Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pilihan rasional (*rational choice theory*), teori yang dipopulerkan oleh James S. Coleman (1989). Teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh Coleman terlihat jelas dalam gagasan dasarnya dimana “tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”.

Dalam pendekatan rasional, para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik, kandidat yang diajukan serta pilihan kandidat yang menguntungkan, dapat diartikan pemilih dapat menentukan pilihannya yang didasarkan pada pertimbangan secara rasional. Pengguna teori pendekatan rasional dalam hal ini menjelaskan suatu perilaku memilih para ilmuwan politik yang sebenarnya diambil dari adaptasi ilmu ekonomi dengan melihat adanya perumpamaan antara ekonomi (pasar) dan politik (perilaku memilih).

Hal tersebut terlihat saat pemilih pemula menentukan pilihan mereka kepada kandidat yang dapat memberikan keuntungan sebanyak-banyaknya. Contohnya ketika kandidat tersebut melakukan *money politic* dengan memberikan sejumlah barang, uang atau hal lainnya yang dapat diartikan untuk membeli suara. Tidak hanya itu, beberapa pemilih pemula juga memilih kandidat dengan melihat sosok dan latar belakang pribadi dari pada prestasi maupun rekam jejak dalam berpolitik.

Pada kenyataannya teori diatas terbukti pada salah satu Satuan Pendidikan Tingkat Kejuruan di Kota Pangkalpinang. SMK N 4 Kemaritiman adalah satu-satunya sekolah yang menggunakan sistem komando semi kemiliteran dalam basis pendidikannya. Hal tersebut membuat pengaplikasian nilai-nilai pendidikan karakter yang ditanamkan mengedepankan prinsip nasionalisme, jiwa kebangsaan dan nilai kesatuan persatuan terhadap mental karakter Taruna/i.

Hal tersebut nyatanya memiliki implikasi yang sangat strategis yaitu dalam menentukan sikap politiknya. Taruna/i yang dididik sedemikian rupa memiliki orientasi dalam menentukan rasionalitas politiknya kearah yang sejalan dengan figur dan karakter yang dia miliki, dalam hal ini Taruna/i akan cenderung menjatuhkan pilihannya pada figur Purnawirawan tentara dan basis partai politik berideologi nasionalis yang menjadi mesin politik dalam kontestasi pemilu.

Menurut Bayu Pratama, seorang Staf Ahli Komandan Batalyon 013-014 Pangkalan Marinir 4 Kota Pangkalpinang saat ditanya bagaimana pendapatnya tentang kontestasi Pemilu Presiden tahun 2014 silam, dia menuturkan bahwasanya dunia pemerintahan akan lebih baik dipimpin oleh seseorang yang memiliki rekam jejak dalam dunia militer. Menurutnya seseorang yang dianggap mampu untuk memimpin negara sebesar Indonesia adalah orang yang tegas, serius, berani dan disiplin layaknya seorang tentara.

Jika dilihat antara pernyataan Bayu Pratama yang juga seorang Taruna Senior di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang dengan basis dasar pendidikan yang dia terima disekolah tersebut, maka hal ini berbanding lurus dengan apa yang ia pahami terkait dengan sosok pemimpin dan karakternya. Wajar saja dikarenakan Presiden dipilih melalui Pemilu yang dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik sehingga Taruna/i memiliki sudut pandang politik yang berbeda dalam hal menentukan pilihannya.

Kejadian ini sangatlah disayangkan bahwasanya apakah dengan adanya keterbukaan pilihan dalam berdemokrasi, pemikiran yang rasional serta moderatnya pendidikan dalam partisipasi politik belum bisa dijadikan modal yang cukup bagi mereka untuk menentukan pilihannya yang tidak semata-mata didasarkan hanya bermodalkan latar belakang seorang purnawirawan tentara atau hanya karena didukung oleh partai nasionalis mereka sudah pasti akan memilihnya.

Penulis berpandangan bahwa kenyataan ini merupakan masalah yang sangat penting dan strategis mengingat bagaimana potensi pemilih pemula dalam pemilu yang dapat memberikan hasil yang signifikan terhadap kemajuan suatu daerah dan negara atas pilihan mereka. Jika nyatanya mereka memilih hanya karena kesamaan latar belakang tanpa melihat potensi, prestasi serta visi dan misi untuk membangun negeri, maka Indonesia masih belum dapat dikatakan sebagai negara yang memiliki iklim demokrasi yang maju dalam melaksanakan pemilu, hal ini bisa dilihat dari potensi dan level partisipasi politik yang rendah.

Melihat fakta lapangan yang sedemikian rupa nyatanya, membuat penulis meyakinkan diri untuk melakukan penelitian terhadap Rasionalitas Politik Taruna Pemilih Pemula di SMK N 4 Kemaritiman. Dalam hal ini penulis memiliki tiga alasan mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan, yaitu:

1. Pertama, penelitian ini merupakan penelitian pertama yang dilakukan baik meliputi objek maupun subjek penelitian yang diikutsetakan didalamnya. Penelitian ini juga berangkat dari fenomena sosial kemasyarakatan didalamnya sehingga konteks maupun konsep penelitian dapat dikatakan memiliki kapabilitas dan integritas yang professional sehingga tidak dibuat-buat.
2. Kedua, SMK N 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang adalah satu-satunya sekolah berbasis pendidikan semi-kemiliteran di kota Pangkalpinang, sehingga dapat menjadi objek penelitian yang strategis dan terpercaya yang dapat membuat minimnya kesalahan informasi yang didapat selama penelitian.
3. Ketiga, ditengah era modern dan penuhnya akses dalam melihat dan menilai pilihan dalam pemilu baik dari sosok calon maupun partai politik, Taruna/i seharusnya dapat menunjukkan kedewasaannya dalam menentukan pilihan politik yang tidak hanya didasarkan pada pilihan emosional semata.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Bagaimana Rasionalitas Taruna Pemilih Pemula Dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 di SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Rasionalitas Taruna Pemilih Pemula Dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 di SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam lingkup teoritis maupun praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan dibidang kajian pemilih pemula dan demokrasi khususnya mengenai rasionalitas pilihan pemilih pemula.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi kepada masyarakat pada umumnya dan pemilih pemula pada khususnya untuk dapat menentukan pilihannya secara rasional dengan mengesampingkan emosional dalam menentukan pilihannya.

1.5 Tinjauan Pustaka

1.5.1 Rasionalitas Politik Pemilih Pemula di Tegalsari Surabaya 2016

Pemilihan umum merupakan salah satu realisasi dari sistem demokrasi yang berfungsi menampung aspirasi masyarakat yang pluralistic dalam menentukan calon pemimpin rakyat. Demokrasi bermakna “rakyat berkuasa” atau “*government or rule by the people*”.

Pendidikan politik yang masih cenderung rendah berdampak pada pemilih pemula yang menjadi sasaran praktik *money politic*. Selain itu, sikap apatis dan terdapat golput dalam pemilihan umum merupakan efek nyata dari rendahnya pendidikan politik. Penelitian ini menggunakan teori tindakan rasionalitas Weber dan motif tindakan Alfred Schutz untuk membongkar motif sebab (*because of motive*) dan motif tujuan (*in order to motive*) rasionalitas politik pemilih pemula.

Hasil penelitian menunjukkan motif sebab (*in order to motive*) partisipasi politik pemilih pemula didorong oleh beberapa motif yakni, dorongan sosialisasi politik, dorongan peer group, dan dorongan pengalaman organisasi. Sedangkan motif tujuannya yakni, mencari pengalaman, mencari hiburan serta mengisi waktu luang, dan mengikis sikap apatis. Selain itu, partisipasi juga didorong oleh adanya pemberian sejumlah uang, sembako, kaos, dan pemberian barang-barang lainnya.

1.5.2 Pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet Kecamatan Kakasoleh

Fenyapwain (2013), pemilihan umum sebagai sarana demokrasi telah digunakan disebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia yang memiliki masyarakat yang heterogen. Kesadaran Politik warga negara menjadi factor determinan dalam partisipasi politik masyarakat, artinya sebagai hal yang berhubungan pengetahuan dan kesadaran akan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan masyarakat dan kegiatan politik menjadi ukuran dan kadar seseorang terlibat dalam proses partisipasi politik.

Banyak sekali cara yang ditempuh oleh calon kepala daerah untuk menarik minat rakyat, salah satu pendekatan yang dipakai oleh calon kepala daerah ialah dengan memasang iklan sebagai sarana sosialisasi. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah apa dan bagaimana pengaruh Iklan Politik dalam Pemilukada Minahasa terhadap Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Tounelet kecamatan Kakas ?.

Penelitian ini dikaitkan teori Efek Media Massa yaitu Teori Efek Moderat, Teori ini mengasumsikan bahwa pengaruh media massa tidak berada pada posisi yang tak terbatas ataupun terbatas, melainkan akan sangat tergantung pada individu yang diterpa pesan media massa.

Banyak variabel yang ikut berpengaruh terhadap proses penerimaan pesan diantaranya tingkat pendidikan, lingkungan sosial, kebutuhan, dll. Berdasarkan perhitungan Korelasi Product Moment iklan politik memberikan kontribusi sebesar 17,30% dan terdapat pengaruh yang signifikan antara iklan politik dan partisipasi pemilih pemula. Sedangkan hasil perhitungan analisis Regresi Linear Sederhana, terdapat pengaruh yang berpola linear antara iklan politik terhadap partisipasi pemilih pemula dalam pengujian linearitas.

1.5.3 Pemimpin Ideal Menurut Pandangan Pemilih Pemula di Kota Semarang dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014

Akdasenda, dkk (2013), pada tahun 2014 Indonesia melaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Peserta pemilu presiden dan wakil presiden adalah mereka yang berasal dari masing-masing partai politik ataupun gabungan partai politik yang telah memenuhi syarat, yaitu yang telah memperoleh jumlah kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi yang ada di DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden).

Penelitian ini menggunakan tipe eksploratif dengan analisa data kuantitatif. Dari data tersebut maka yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula pada pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.

1.5.4 Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula dalam Pilkada Suatu Refleksi *School-Based Democracy Education* (Studi Kasus Pilkada Kabupaten Halmahera Timur Provinsi Maluku Utara Tahun 2010)

Batawi (2010), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat kesadaran siswa SLTA sebagai pemilih pemula dalam pilkada dalam konteks berpolitik dan penerapan sekolah sebagai laboratorium demokrasi (*School-Based Democracy Education*).

Penelitian mengambil sampel siswa SLTA di wilayah Wasile sebanyak 35 responden dan wilayah Maba sebanyak 40 responden. Wilayah Wasile mengambil 3 sekolah sedangkan wilayah Maba sebanyak 6 sekolah yang berbeda. Responden adalah siswa yang telah melakukan pemilihan/pencoblosan pada masa pilkada untuk memilih kepala dan wakil kepala daerah di wilayah kabupaten Halmahera Timur (Haltim) tahun 2010.

Penelitian ini menggunakan metodologi observasi, wawancara langsung dan pengisian kuesioner. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman belajar konsep berpolitik di tingkat persekolahan. Sedangkan 60 persen siswa senang terdaftar sebagai pemilih pemula dalam pilkada.

Sebagai pemilih pemula, siswa dihadapkan pada persoalan psikologis yaitu menempatkan jati diri dan pemahaman tentang belajar berpolitik yang banyak dipengaruhi oleh pergaulan antar rekan sejawat dan lingkup persekolahan. Selain itu, jika dipetakan dari tingkat kesadaran tidak terlepas dari pengalaman yang masih barudan awam sebagai pemilih pemula, sehingga peran guru dan lingkungan persekolahan dapat dijadikan laboratorium demokrasi yang komprehensif.

Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran ikut aktif berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Faktor-faktor yang menonjol dari tingkat kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada dapat ditemukan dalam daya kritis siswa seputar pemahaman makna berpolitik di diskusi kelas.

1.5.5 Orientasi Politik yang Mempengaruhi Pemilih Pemula dalam Menggunakan Hak Pilihnya pada Pemilihan Walikota Semarang Tahun 2010 (Studi Kasus Pemilih Pemula Di Kota Semarang)

Setiajid (2011), pemilih pemula dalam kategori politik adalah kelompok yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya. Orientasi politik pemilih pemula ini selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung dengan data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Semarang 2010 adalah faktor pengaruh orangtua, faktor pilihan sendiri, faktor media massa, partai politik dan iklan politik, dan faktor teman sepergaulan.

Faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan walikota Semarang 2010 adalah faktor pengaruh dari pilihan sendiri (40%) dan orang tua (32%). Orientasi politik pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Semarang 2010 baik itu meliputi orientasi kognitif, afektif maupun evaluatif sudah mengarah pada tataran orientasi positif dimana yaitu orientasi yang ditunjukkan dengan tingkat pengetahuan dan frekuensi kesadaran yang tinggi, perasaan dan evaluasi positif terhadap obyek politik.

Tabel 1.1

Kajian Tinjauan Pustaka

No	Tinjauan Pustaka	Posisi Penelitian
1	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz. Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi lebih bermaksud untuk memahami motif sebab dan motif tujuan partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan umum presiden tahun 2014.	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan pilihan rasional S.Coleman. Penelitian kualitatif dengan pendekatan pilihan rasional lebih bermaksud untuk memahami pilihan para pemilih pemula yang ditentukan dari pemikiran terkait issue politik dan kandidat atau figur.
2	Iklan Politik dalam Pemilu memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap partisipasi pemilih pemula atau sekitar 17,30% sedangkan sisanya ditentukan oleh variabel lainnya, seperti faktor lingkungan, keluarga dan nilai-nilai sosial yang dianutnya.	Penelitian tersebut menjadikan iklan sebagai sumber pembentukan opsi bagi pemilih pemula dalam menentukan pilihannya, sedangkan penelitian ini menjadikan penentuan rasional dalam pertimbangan pemilih pemula untuk menentukan pilihannya.
3	Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemimpin yang ideal menurut pemilih pemula adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya dan pemimpin yang memiliki visi dan misi yang jelas.	Jika dalam penelitian sebelumnya persepsi calon pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin yang tidak cacat hukum, pemimpin yang memiliki rasa kepedulian terhadap anggotanya, maka penelitian ini akan memfokuskan pada persepsi latar belakang sang calon yang dilihat dari figur atau sosok kandidat.
4	Faktor yang menonjol dari tingkat kesadaran politik siswa sebagai pemilih pemula dalam pilkada dapat ditemukan dalam daya kritis siswa seputar pemahaman makna berpolitik di diskusi kelas.	Dalam penelitian ini, Taruna/i melihat bahwa rekam jejak dalam karier serta kepribadian (sosok) sang calonlah yang menjadi sumber informasi utama dalam melihat serta menentukan pilihannya.
5	Penelitian ini mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi pemilih pemula dalam pemilihan walikota Semarang tahun 2010. Faktor yang dominan yang mempengaruhi pemilih pemula adalah faktor pengaruh dari pilihan sendiri (40%) dan orang tua (32%).	Faktor primer yang menjadi pertimbangan Taruna/i dalam menentukan pilihannya adalah figur atau kandidat yang diajukan sehingga terkadang pilihan-pilihan yang muncul tidaklah bersifat secara profesional melainkan datang karena pilihan yang rasional karena kesamaan tertentu

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

1.6 Kerangka Teori

1.6.1 Teori Rasionalitas

Teori ini dikemukakan oleh James S. Coleman (1989). Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.

Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud, artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan atau nilai dan keperluan. Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor, yang penting adalah kenyataan bahwa untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan pilihan aktor (Ritzer & Goodman, 2007).

Tabel 1.2

Unsur Dalam Teori Rasionalitas

Unsur Dalam Teori Rasionalitas	
Aktor	Sumber Daya
Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan).	Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.

Sumber: James S. Coleman dalam (Afnaniyati, 2012)

Ada beberapa pendekatan dalam memahami perilaku memilih, yaitu sebagai berikut:

1. Pendekatan Sosiologis. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang. Karakteristik seseorang (seperti pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya) dan karakteristik atau latar belakang sosiologis (seperti agama, wilayah, jenis kelamin, umur, dan sebagainya) merupakan faktor penting dalam menentukan pilihan politik.

Pendek kata, pengelompokan sosial seperti umur (tua muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya (Asfar, 2006).

Pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya, merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku politik seseorang, karena kelompok-kelompok inilah yang mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang.

2. Pendekatan Psikologis. Pendekatan ini muncul dikarenakan adanya reaksi ketidakpuasan terhadap pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis dianggap secara metodologi sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama, dan sebagainya.

Apalagi, pendekatan sosiologis umumnya hanya sebatas menggambarkan dukungan suatu kelompok tertentu pada suatu partai politik, tidak sampai pada penjelasan mengapa suatu kelompok tertentu memilih/mendukung suatu partai politik tertentu sementara yang lain tidak (Asfar, 2006).

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi, terutama konsep sosialisasi dan sikap untuk menjelaskan perilaku memilih. Penganut pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Oleh karena itu, pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis sebagai kajian utama, yaitu pendekatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat.

3. Pendekatan Rasional. Dalam pendekatan rasional, para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan, artinya para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional. Penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi.

Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik). Apabila secara ekonomi masyarakat dapat bertindak secara rasional, yaitu menekan ongkos sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya, maka dalam perilaku politikpun masyarakat akan dapat bertindak secara rasional, yakni memberikan suara ke partai politik yang dianggap mendatangkan keuntungan dan kemaslahatan yang sebesar-besarnya dan menekan kerugian atau kemadharatan yang sekecil-kecilnya (Asfar, 2006).

Jika melihat perilaku pemilih pemula melalui pendekatan ini, maka dapat dilihat bahwa pemilih pemula menggunakan ilmu ekonomi sebagai panutannya. Hal ini dapat dilihat ketika pemilih pemula memilih kandidat yang dapat memberinya keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya, memilih kandidat yang memberinya uang atau materi sebagai harga dari suara yang akan digunakannya. Selain itu, pemilih pemula juga cenderung memilih kandidat berdasarkan figurnya bukan kemampuannya sehingga pemilih pemula juga cenderung mudah dimanfaatkan oleh partai politik.

1.6.2 Teori Partisipasi Politik

Partisipasi politik kaum muda atau pemilih pemula dapat diartikan sebagai penentuan sikap dan keterlibatan kaum muda sebagai individu atau kelompok dalam even/bidang politik. Menurut Huntington (Veplun, 2014) terdapat 2 bentuk partisipasi warga negara termasuk kaum pemula terdiri dari:

Tabel 1.3

Perbedaan Antara Partisipasi Konvensional Dengan Non-Konvensional

Partisipasi Konvensional	Partisipasi Non Konvensional
Partisipasi konvensional antara lain pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk atau bergabung dengan kelompok atau partai politik tertentu, atau komunikasi dengan pejabat partai politik tertentu.	Partisipasi non konvensional antara lain dengan pengajuan petisi, berdemonstrasi/unjuk rasa, mogok, konfrontasi, tindakan kekerasan politik, terhadap harta benda, perusakan, pemboman, pembakaran, tindak kekerasan politik terhadap manusia, penculikan, pembunuhan, bahkan perang dan revolusi.

Sumber: Huntington dalam (Veplun, 2014)

Selain bentuk partisipasi terdapat pula tipe partisipasi politik warga negara seperti berikut:

Tabel 1.4

Tipe-Tipe Partisipasi Politik

No	Tipe Partisipasi Politik
1	Partisipasi politik aktif. Kesadaran dan kepercayaan politik tinggi
2	Partisipasi politik apatis. Kesadaran dan kepercayaan politik yang rendah, disebabkan oleh kurang kepercayaan terhadap pemerintah
3	Partisipasi politik pasif. Kesadaran politik rendah sedangkan kepercayaan tinggi terhadap politik,
4	Partisipasi politik militan radikal. Kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan politik rendah.

Sumber: Huntington dalam (Veplun, 2014)

Selain bentuk dan tipe partisipasi politik terdapat pula sejumlah kegiatan politik yang sering dilakukan dan terjadi dalam kehidupan masyarakat, yaitu mencari dukungan atau kampanye, *lobby* politik, mencari koneksi (*contacting poiltict*) bahkan tidak jarang terdapat tindakan kekerasan politik (*violence*). Sitepu dan Herbert McKlosky (Budiardjo, 2008) memberikan definisi partisipasi politik sebagai berikut:

“Partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan-kebijakan umum (*the term of political participation will refer to those voluntary activities by which members of a society share in the selection of rulers and, directly or indirectly, in the formation of public policy*)”.

Budiardjo (2008) mengatakan bahwa partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (*contacting*) atau *lobbying* dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial dengan *direct action*-nya dan sebagainya.

1.6.3 Pemilihan Umum Kepala Daerah

Menurut Morissan (2005), pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara kedepan. Pandangan *Centre for Electoral Reform* (Cetro), pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu tonggak demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik.

Pemilu mempunyai fungsi kontrol terhadap kekuasaan yang cenderung untuk bersifat *absolute* apabila tidak dikontrol dan diperbaharui. Sebagaimana maknanya demokrasi dilihat dari asal katanya bermakna rakyat “berkuasa” atau “*government or rule by the people*” (Budiarjo dalam Astanti, 2016). Dalam tingkat daerah pemilu dilakukan untuk memilih kepala daerah dan pemilihan anggota DPRD (pileg).

Pilkada adalah mekanisme demokrasi yang disiapkan pemerintah agar masyarakat dapat memilih pemimpin mereka di tingkat daerah mulai dari Gubernur, Bupati dan Walikota. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) adalah sarana pelaksana kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (PP No. 6 Tahun 2005).

Nuryanti (2016), mengatakan bahwa secara teoritik Pilkadada merupakan kompetisi politik ditengah masyarakat, tetapi Pilkadada telah berubah dengan menampilkan politik kepartaian dalam versinya sendiri. Dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan melalui masa persiapan dan tahap pelaksanaan. Masa persiapan dalam Pilkada adalah:

- a. Pemberitahuan DPRD kepada kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
- b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
- e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau.

Tahapan pelaksanaan pilkada adalah:

- a. Penetapan daftar pemilih;
- b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah;
- c. Kampanye;
- d. Pemungutan suara;

- e. Penghitungan suara;
- f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah terpilih, pengesahan dan pelantikan.

Pemilihan umum di provinsi dilakukan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dengan istilah Pemilihan Gubernur (Pilgub). Menurut Muslim (Lindawati, 2014), Pilgub adalah suatu proses demokrasi dengan cara memilih calon Gubernur dan Wakil Gubernur untuk satu Provinsi dengan sah dan sesuai undang-undang yang ada, dan diikuti dengan seluruh masyarakatnya. Hal tersebut diperkuat didalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, dimana pengertian Pemilukada adalah:

”Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Menurut Dieter Nohlen (Lindawati, 2014) fungsi pemilihan umum antara lain:

- a. Legitimasi (pengabsahan) sistem politik dan pemerintahan satu partai atau partai koalisi;
- b. Pelimpahan kepercayaan kepada seseorang atau partai;
- c. Representasi pendapat dan kepentingan para pemilih;
- d. Mobilisasi massa pemilih demi nilai-nilai masyarakat, tujuan-tujuan dan program-program politik, kepentingan partai politik peserta Pemilu;
- e. Pengarahan konflik politik secara konstitusi ke arah penyelesaian secara damai;
- f. Mengundang satu persaingan untuk perebutan kekuasaan berdasarkan penawaran program-program tandingan;
- g. Memancing keputusan untuk menetapkan pembentukan satu Pemerintah, misalnya lewat pembentukan kekuatan mayoritas dalam parlemen.

1.6.4 Pemilih Pemula

Menurut Veplun (2014), pemilih di Indonesia dibagi menjadi tiga kategori. Pertama pemilih rasional, yakni pemilih memilih partai berdasarkan penilaian dan analisis mendalam. Kedua, pemilih kritis emosional, yakni pemilih yang masih idealis dan tidak kenal kompromi. Ketiga, pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali memilih karena usia mereka baru memasuki usia pemilih.

Menurut pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008, pemilih adalah warga negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin, kemudian dalam pasal 19 ayat (1 dan 2) menerangkan bahwa pemilih yang mempunyai hak memilih adalah warga negara Indonesia yang didaftar oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih dan pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin.

Pemilih pemula merupakan golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun, namun ada definisi yang lain yaitu pemilih pemula adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa atau pemilih pemula ini adalah mereka yang baru akan mempunyai pengalaman pertama kali di dalam berpartisipasi dalam pemilihan umum, (Rohmah dalam Astanti,2016).

1.7 Definisi Konseptual

Konsep atau penjelasan dalam penelitian ini merupakan definisi secara singkat dari kelompok fakta atau fenomena-fenomena yang akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Pendekatan Rasional. Dalam pendekatan rasional, para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik, kandidat yang diajukan dan kandidat yang dapat memberikan keuntungan.
2. Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu tonggak demokrasi yang berfungsi sebagai instrumen rekrutmen politik serta memfasilitasi proses sirkulasi elit politik.
3. Pemilih pemula merupakan golongan penduduk usia 17 tahun hingga 21 tahun namun ada definisi yang lain yaitu pemilih pemula adalah mereka yang berstatus pelajar, mahasiswa, serta pekerja muda atau pemilih pemula ini adalah mereka yang baru akan mempunyai pengalaman pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum.

1.8 Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan dari gejala-gejala yang diidentifikasi dengan tujuan untuk menjawab masalah penelitian. Dalam hal penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan pilihan rasional (rational choice theory), teori ini dikemukakan oleh James S. Coleman (1989). Ada dua unsur utama dalam teori Coleman, yaitu aktor dan sumber daya.

Table 1.5

Unsur Dalam Teori Rasionalitas

Unsur Dalam Teori Rasionalitas	
Aktor	Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan).
Sumber Daya	Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.

Sumber: James S. Coleman dalam (Afnaniyati, 2012)

Teori pilihan rasional Coleman terhadap aktor sebagai unsur dari teori rasionalitas tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa “tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi)”. Dalam pendekatan rasional, rasionalitas para pemilih pemula dalam Pilkada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 dilihat dari:

1. Issue - issue politik: Para pemilih dapat menentukan pilihannya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional dimana tindakan perseorangan mengarah kepada tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (preferensi).
2. Kandidat yang diajukan: Pemilih pemula juga cenderung memilih kandidat berdasarkan figurnya bukan kemampuannya sehingga pemilih pemula juga cenderung mudah dimanfaatkan oleh partai politik.
3. Memilih kandidat yang dapat memberikan keuntungan: Hal ini dapat dilihat ketika pemilih pemula memilih kandidat yang dapat memberinya keuntungan yang sebesar-besarnya. Misalnya, memilih kandidat yang memberinya uang atau materi sebagai harga dari suara yang akan digunakannya. Artinya penggunaan pendekatan rasional dalam menjelaskan perilaku memilih oleh ilmuwan politik sebenarnya diadaptasi dari ilmu ekonomi. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik).

1.9 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan ilmu yang mempelajari tentang cara penelitian ilmu tentang alat-alat dalam suatu penelitian. Oleh karena itu metode penelitian membahas tentang konsep teoritis berbagai metode, kelebihan dan kelemahan yang dalam suatu karya ilmiah. Kemudian dilanjutkan dengan pemilihan metode yang akan digunakan dalam penelitian nantinya.

Dalam proposal penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua metode yaitu: pertama, peneliti menggunakan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang peneliti pilih. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Kedua, menggunakan "Library Research" yang mana metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini.

Table 1.6

Metode Penelitian

Metode Penelitian	
Field Research	Library Research
Metode penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai jenis-jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan yang sesuai dengan obyek yang peneliti pilih	Metode dalam penelitian ini nantinya menggunakan teori-teori yang diambil dari buku literatur yang mendukung dan relevan dengan judul skripsi ini.

Sumber: Moleong (2006)

1.9.1 Jenis Penelitian

Kirk dan Miller (Moleong, 2006) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai suatu tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya.

1.9.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Satuan Pendidikan Kota Pangkalpinang, yaitu SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang, Kantor Kepala Sekolah, Kantor Wakil Kepala Sekolah, Kantor Jurusan Pelayaran, Kantor Jurusan Perikanan, Kantor Ketarunaan dan Markas Besar Pramuka USS.M4.

Table 1.7

Lokasi Penelitian

No	Tempat	Lokasi
1	Kantor Kepala Sekolah	SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang
2	Kantor Wakil Kepala Sekolah	SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang
3	Kantor Jurusan Pelayaran	SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang
4	Kantor Jurusan Perikanan	SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang
5	Kantor Ketarunaan	SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang
6	Markas Besar Pramuka USS.M4	SMK Negeri 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

1.9.3 Unit Analisis Penelitian

Pola analisis data yang akan digunakan adalah etnografik, yaitu dari catatan lapangan (field note) kemudian akan dilakukan pengkodean, kategorisasi atau klasifikasi kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya akan disusun tema-tema berdasarkan hasil analisis data tersebut. Sebagai bahan pijakan sekaligus pisau analisis digunakan pula teori-teori yang relevan dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung. Adapun data menurut Suharsimi Arikunto (1998) mengatakan bahwa sumber data dibagi menjadi tiga macam, yakni:

Table 1.8

Unit Analisis Penelitian

No	Jenis	Sumber
1	Person	Taruna-Taruni
2	Place	Tempat (sarana dan prasarana)
3	Paper	Latar belakang sekolah, Visi dan Misi

Sumber: Suharsimi Arikunto dalam (Moleong, 2006)

1.9.4 Subjek Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X, XI dan XII atau Taruna/i tingkat I, II dan III SMK N 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang. Sampel adalah sebagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Disini peneliti menggunakan *Purposive Sampling* (tujuan/target sampel) yang mengambil sebagian Taruna/i yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu (pemilih pemula) di SMK N 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang.

Table 1.9

Subjek Penelitian

Subjek Penelitian		Lokasi
Populasi	Sampel	
Seluruh siswa kelas X, XI dan XII atau Taruna/i tingkat I, II dan III	Sebagian Taruna/i yang sudah memiliki hak pilih dalam pemilu (pemilih pemula)	SMK N 4 Kemaritiman Kota Pangkalpinang

1.9.5 Jenis Data Penelitian

Jenis data adalah suatu hal yang diperoleh di lapangan ketika melakukan penelitian dan belum diolah. Atau dengan pengertian lain, suatu hal yang dianggap atau diketahui. Data kualitatif yaitu yang disajikan dalam bentuk kata verbal, bukan dalam bentuk angka. Sumber data merupakan subjek dari mana data dapat diperoleh.

1.9.6 Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan subyek dari mana data dapat diperoleh (Arikunto, 1998). Sumber data dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data skunder. Menurut Sari (Usman dan Akbar, 2006), data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama, sedangkan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh penelitian untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh dari tanggapan responden dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang pilihan taruna-taruni dalam menentukan rasionalitasnya terhadap politik baik kepada figur maupun partai politik.

Table 1.10
Sumber Data Penelitian

Data Primer	Data Sekunder
Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti atau pihak pertama.	merupakan data yang dikumpulkan oleh pihak lain dan dimanfaatkan oleh penelitian untuk kebutuhan penelitian yang dilakukannya.
Hasil Wawancara Responden	Hasil Dokumentasi
Hasil Observasi	Buku-buku
	Internet
	Dokumen hasil Pemilu 2015 (Jumlah DPT, TPS, Jumlah Pemilih Pemula, dll)
	Dokumen hasil Pemilu 2017 (Jumlah DPT, TPS, Jumlah Pemilih Pemula, dll)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

1.9.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yakni membicarakan tentang bagaimana cara penulis mengumpulkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Wawancara (interview). Metode wawancara/interview adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) wawancara.

Dalam menggunakan metode ini peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Taruna/i yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan mempunyai pengalaman pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan mulai dari issue-issue politik, kandidat yang diajukan dan memilih kandidat yang dapat memberikan keuntungan.

2. Metode Observasi (pengamatan). Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata dan dibantu dengan panca indera lainnya. Marshall menyatakan bahwa, "*Through observation, the researcher learn about behavior and the meaning attached to those behavior*". Melalui observasi, penulis belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Adapun observasi yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis observasi partisipatif, yaitu penulis terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati meliputi lingkungan pendidikan, aktivitas belajar mengajar serta interaksi sosial selama bersekolah.

3. Metode Dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri data historis. Adapun metode dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah buku-buku, catatan-catatan, surat kabar, internet dan koran yang memiliki korelasi dan dapat menjadi referensi dalam menjelaskan tentang rasionalitas, pemilu dan pemilihan pemula.

Tabel 1.11
Teknik pengumpulan data

No	Teknik pengumpulan data	
1	Metode Wawancara	Peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung dengan Taruna/i yang sudah berusia 17 tahun atau lebih dan mempunyai pengalaman pertama kali berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan membawa instrumen penelitian sebagai pedoman pertanyaan tentang hal-hal yang akan ditanyakan dengan cara menanyakan beberapa pertanyaan mulai dari issue-issue politik, kandidat yang diajukan dan memilih kandidat yang dapat memberikan keuntungan.
2	Metode Observasi	Observasi yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis observasi partisipasif, yaitu penulis terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati meliputi lingkungan pendidikan, aktivitas belajar mengajar serta interaksi sosial selama bersekolah.
3	Metode Dokumentasi	Metode pengumpulan data yang digunakan untuk menelusuri buku-buku, catatan-catatan, surat kabar, internet dan koran yang memiliki korelasi dan dapat menjadi referensi dalam menjelaskan tentang rasionalitas, pemilu dan pemilih pemula.

Sumber: Bogdan dan Biklen dalam (Moleong, 2006)

1.9.8 Teknik Analisis Data

Bogdan dan Biklen seperti yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2006) mengatakan bahwa analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun langkah-langkah dalam teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data. Reduksi data diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan. Dalam proses reduksi data ini, peneliti dapat melakukan pilihan-pilihan terhadap data yang hendak dikode, mana yang dibuang, mana yang merupakan ringkasan dan cerita-cerita apa yang sedang berkembang. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

2. Display Data. Display data merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.

3. Verifikasi dan Simpulan. Sejak awal pengumpulan data peneliti harus membuat simpulan-simpulan sementara. Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan. Setelah data masuk terus menerus dianalisis dan diverifikasi tentang kebenarannya, akhirnya didapat simpulan akhir lebih bermakna dan lebih jelas. Simpulan adalah intisari dari temuan penelitian yang menggambarkan pendapat-pendapat terakhir yang berdasarkan pada uraian-uraian sebelumnya. Simpulan akhir yang dibuat harus relevan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian dan temuan penelitian yang sudah dilakukan pembahasan.

Tabel 1.12

Teknik Analisis data

No	Teknik Analisis data	
1	Reduksi Data	Diawali dengan menerangkan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting terhadap isi dari suatu data yang berasal dari lapangan, sehingga data yang telah direduksi dapat memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.
2	Display Data	Merupakan proses menampilkan data secara sederhana dalam bentuk kata-kata, kalimat naratif, table, matrik dan grafik dengan maksud agar data yang telah dikumpulkan dikuasai oleh peneliti sebagai dasar untuk mengambil kesimpulan yang tepat.
3	Verifikasi dan Simpulan	Dalam tahap akhir, simpulan-simpulan tersebut harus dicek kembali (diverifikasi) pada catatan yang telah dibuat oleh peneliti dan selanjutnya kearah simpulan yang mantap. Penarikan simpulan bisa jadi diawali dengan simpulan tentative yang masih perlu disempurnakan.

Sumber: Bogdan dan Biklen dalam Moleong, 2006)

1.10 Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk dapat mengetahui isi penelitian ini, maka secara singkat akan disusun dalam empat bab yang terdiri dari bab satu yaitu pendahuluan dengan menjelaskan tentang latar belakang permasalahan yang menjadi latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penelitian, kajian teori, landasan teori dan metode penelitian yang menjelaskan mengenai populasi, sampel, variabel yang digunakan, jenis data, sumber data dan metode pengumpulan data.

Bab dua menjelaskan tentang gambaran lingkungan pendidikan SMK N 4 sebagai pemetaan dan wilayah objek penelitian yang menjadi Satuan Pendidikan dimana sekolah tersebut menggunakan sistim komando semi kemiliteran dalam basis pendidikan umum, profil sekolah, profil taruna-taruni sebagai peserta didik serta Kesatuan Komando Batalyon sebagai organisasi ketarunaan.

Bab ketiga akan menjelaskan dan menguraikan pembahasan dari penelitian yang dilakukan tentang rasionalitas Taruna/i sebagai pemilih pemula, sedangkan Bab keempat yaitu penutup yang terdiri atas simpulan mengenai rasionalitas Taruna/i pemilih pemula serta saran sebagai bahan masukan dan rekomendasi atas solusi dalam memberikan pandangan politik kepada Taruna/i.